

InternationalMedia

KAMIS 2 DESEMBER 2021

HARGA ECERAN DALAM KOTA RP2500, LUAR KOTA+ONGKOS KIRIM



IDN/ANTARA

PRESIDEN LANTIK KEANGGOTAAN KOMISI NASIONAL DISABILITAS

Presiden Joko Widodo (kanan) mengambil sumpah dan jabatan saat melantik keanggotaan Komisi Nasional Disabilitas Periode 2021-2026 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/12). Komisi Nasional Disabilitas yang beranggotakan tujuh orang tersebut akan bertugas memantau, mengevaluasi, mengadvokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Aneh, MK Minta Perbaiki UU Cipta Kerja, Tapi yang akan Direvisi DPR UU PPP

Sekalipun dicantumkan soal omnibus law dalam revisi UU PPP, tak otomatis menyelesaikan persoalan inkonstitusional bersyarat UU Cipta Kerja. Karena UU yang baru tidak berla surut.

JAKARTA (IM) - Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari berpandangan, rencana revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang

Cipta Kerja inkonstitusional. Feri mengatakan, dalam putusannya, MK tidak memerintahkan pemerintah dan DPR untuk merevisi UU PPP, tetapi memperbaiki UU Cipta Kerja. Tapi, DPR malah berencana merevisi UU PPP. "Di dalam putusan tersebut jelas yang diperintahkan untuk diperbaiki adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara itu, kalau dilihat yang menjadi pertimbangan adalah tidak taat prosedurnya pembentukan Undang-Undang

Cipta Kerja ini berdasarkan Undang-Undang 12/2011," kata Feri saat dihubungi, Selasa (30/11). "Aneh kemudian kalau Undang-Undang 12/2011 yang menyesuaikan diri dengan Undang-Undang 11/2020 (UU Cipta Kerja)," kata Feri melanjutkan. Feri mengingatkan, pandangan untuk mengubah UU PPP tidak masuk dalam amar putusan MK, tetapi hanya ada dalam dissenting opinion hakim MK. Oleh karena itu, menurut Feri, jika

DPR dan pemerintah melakukan yang tertantum di dissenting opinion artinya sama saja menentang isi putusan MK. Ia menegaskan, jika perbaikan UU PPP dilakukan untuk mengatur konsep omnibus law yang telah diterapkan lewat UU Cipta Kerja, itu tidak benar dan bertentangan dengan perintah MK. "Jadi menurut saya ini upaya mencocok-cocokkan hal yang

► Bersambung ke hal 11

Rusia Balas Usir Staf Diplomatik AS

MOSKOW (IM) - Rusia memerintahkan sejumlah staf Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) yang ada di Moskow selama lebih dari tiga tahun terakhir untuk pulang ke negaranya. Perintah ini menjadi langkah balasan atas apa yang disebut Rusia sebagai keputusan AS membatasi masa tugas diplomatik Rusia.

Seperti dilansir Reuters, Rabu (1/12), para staf Kedutaan AS di Moskow itu diperintahkan kembali ke AS pada 31 Januari tahun depan. Perintah itu makin memperdalam perselisihan diplomatik antara kedua negara yang berlangsung beberapa waktu terakhir.

Otoritas Rusia merilis perintah itu setelah Duta Besar Rusia untuk AS menyatakan pekan lalu,

bahwa 27 diplomat Rusia dan keluarganya diusir dari AS dan akan meninggalkan negara itu pada 30 Januari tahun depan.

"Kami ... bermaksud untuk menanggapi dengan cara yang sesuai. Para pegawai Kedutaan Besar AS yang telah berada di Moskow selama lebih dari tiga tahun harus meninggalkan Rusia pada 31 Januari," tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova.

Kantor berita RIA mengutip Zakharova menyatakan bahwa aturan baru AS berarti para diplomat Rusia yang dipaksa meninggalkan AS, juga dilarang untuk bekerja sebagai diplomat di AS selama tiga tahun.

► Bersambung ke hal 11

Polisi Ancam Pidanakan Panitia dan Peserta Jika Nekat Gelar Reuni 212

JAKARTA (IM) - Polda Metro Jaya ancam pidanakan panitia dan peserta jika nekat menggelar aksi Reuni 212 di sekitar atung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta

Pusat, Kamis (1/12). Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes E Zulpan mengatakan pihaknya tidak memberikan izin kegiatan aksi reuni

212 di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya. Bagi masyarakat yang tetap melakukan aksi akan

► Bersambung ke hal 11

Gara-gara Tak Hadiri Rapat, MPR Minta Jokowi Copot Sri Mulyani sebagai Menkeu

JAKARTA (IM) - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Sri Mulyani ndrawati dari jabatan Menteri

Keuangan. Pimpinan MPR kecewa karena Sri Mulyani tidak menghadiri dua kali undangan rapat. Setidaknya ada dua hal yang membuat MPR marah ke Sri

Mulyani. Pertama, anggaran MPR dipangkas Sri Mulyani. Kedua, ketidakhadiran Sri Mulyani dalam

► Bersambung ke hal 11

Waspada Potensi Tsunami 8 Meter, Ini Penjelasan Kepala BMKG

JAKARTA (IM) - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengungkapkan sejumlah potensi bencana yang dapat terjadi di Indonesia pada saat libur Natal dan tahun baru. Pertama, potensi tsunami terjadi di daerah Selat Sunda, tepatnya Cilegon, Banten.

"Kami berikan informasi zona yang rawan tsunami misalnya di Cilegon, Banten, itu juga tempat wisata di Selat Sunda dapat berpotensi skenario terburuk mengalami tsunami dengan ketinggian hingga 8 meter," kata Dwikorita dalam rapat kerja Komisi V DPR dengan Pemerintah, Rabu (1/12).

Sayangnya, Dwikorita tak mengungkapkan lebih lanjut

apakah potensi tsunami juga dapat terjadi di daerah lainnya saat Natal dan tahun baru. Namun ia menyebut ada potensi bencana alam lainnya yang di khawatirkan terjadi, seperti badai tropis.

Potensi bencana itu diungkapkan setelah melihat adanya tren pembentukan badai tropis yang semakin meningkat. "Jadi hampir setiap Minggu dan bahkan saat ini, kemarin baru selesai badai tropis sebelumnya," katanya.

Dwikorita menyebut daerah yang telah terjadi badai tropis baru-baru ini, salah satunya Bengkulu. Daerah di sebelah barat daya Bengkulu sempat terjadi badai tropis Nyatoh. "Dan ini pengaruhnya ada-

► Bersambung ke hal 11



IDN/ANTARA

KOMITMEN KESINERGISAN TNI-POLRI

Kapolda Polri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kanan) dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman (kiri) berjalan menuju lokasi jumpa pers usai melakukan pertemuan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (1/12). Pertemuan tersebut membahas kesinergisan TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di Indonesia.

Yayasan Tzu Chi Indonesia
Bertuturlah dengan kata yang baik,
berpikirlah dengan niat yang baik dan
lakukanlah perbuatan baik.
(Master Cheng Yen)

intiland

Bagus™
パグス
FRESH 99
抗菌手洗い
ANTIBACTERIAL HAND WASH
SABUN CUCI TANGAN ANTI BACTERIAL 99%

ASALTAU!
Pasutri Asal Malaysia dengan
Sepeda Motor Pergi ke Paris



PASANGAN suami istri (pasutri) asal Malaysia akhirnya tiba di Paris, Prancis, dengan mengendarai sepeda motor. Pengunggah video itu, Mohd Alfisahrin, mengatakan bahwa dia dan istrinya membutuhkan waktu 4 bulan untuk sampai di Paris.

Alfisahrin, yang dikenal dengan sapaan Alfi, sebenarnya cukup terkenal di banyak platform media sosial, karena ia telah berbagi perjalanan keliling dunia dengan sepeda motornya sebelum menjadi viral lagi melalui TikTok baru-baru ini, demikian diwartakan World of Buzz.

► Bersambung ke hal 11

Seorang Bayi Tak Divaksin Hanya karena Ibu Pakai Celana Pendek



POSTINGAN curahan hati seorang ibu di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Sulawesi Utara (Sulut), Silvia Sherlly, viral di media social (medsos). Dalam video yang dipostingnya ia mengaku bahwa bayinya tidak diberi suntik vaksin saat imunisasi di puskesmas karena dia memakai celana pendek.

Dinas Kesehatan Minsel angkat bicara untuk meluruskan pengakuan Silvia di medsos. Dalam postingan yang viral, Silvia mengaku

► Bersambung ke hal 11

ACE
The helpful place.

BANK MAYAPADA
Melayani Dengan Komitmen

KursRupiah		
MATA UANG	JUAL	BELI
USD	14.416,00	14.241,00
SGD	10.736,00	10.421,00
AUD	10.385,00	10.185,00
EUR	16.488,00	16.203,00
HKD	1.887,00	1.802,00
GBP	19.335,00	19.040,00

Rabu 1 Desember 2021 16.00 WIB

Kunjungi Website Kami di: <https://internationalmedia.co.id>